

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

#### 3.1 Tinjauan Teori

##### 3.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan.

Berikut ini beberapa pendapat tentang sistem akuntansi menurut para ahli tentang sistem akuntansi. Menurut Mulyadi (2010:3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan dikoordiansi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Rahatjo,Budi (2007:406) sistem akuntansi (accounting system) adalah rangkaian metode dan prosedur (kertas, buku/catatan, laporan) yang digunakan untuk membuku/mencatat, megklarifikasikan, dan meringkas informasi keuangan menjadi laporan untuk distrubusikan kepada para pamakai. Menurut Yunus (2010:14) sistem akuntansi yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengkoordinir atau menyusun, mengiktisarkan keteranga-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan dimana para pegawainya disatu padukan sedemikian rupa sehingga pengawasan baik oleh pemimpin perusahaan maupun pihak yang bersangkutan secara tidak langsung dapat dijalankan sebaik-baiknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan mengelola perusahaan. Sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan besar sangat baik. Dari definisi-definisi sistem akuntansi tersebut unsur-unsur sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan.

### 3.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi

Dalam pengembangan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan, terdapat beberapa tujuan umum, tujuan umum dari sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15) yaitu:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.  
Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada. Ada kalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban kekayaan suatu organisasi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem akuntansi dapat pula ditujukan untuk memperbaiki pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dipercaya.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang lain. Oleh karena itu dalam menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dibanding dengan manfaat yang diperoleh, sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyediaan informasi tersebut. Berdasarkan tujuan dari sistem akuntansi di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan sistem akuntansi bagi perusahaan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem yang sudah ada, baik ketetapan penyajian informasi. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki pengendalian intern dan penyediaan catatan yang lengkap sebagai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan, serta penghemat biaya dari system yang sudah ada.

### 3.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah berdasarkan PMK PP 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkayan sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan laporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
2. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan basis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.1.4 Sistem Pendanaan Dana Pensiun

Pada dasarnya sistem pendanaan dana pensiun PNS terbagi ke dalam 2 sistem. Yaitu :

#### 1. Sistem Pendanaan/Pembayaran Lansung (*Pay As You Go System*)

Istilah pendanaan langsung merujuk pada istilah *Pay As You Go System* atau *current disbursement*. Metode ini adalah bahwa iuran pada program hanya bersumber dari pemerintah, saat pembayaran iuran bersamaan dengan saat pembayaran pensiun. besarnya iuran sama dengan pembayaran pensiun, dan sarana pembayaran bersamaan dengan pembayaran gaji PNS, dapat melalui media pembayaran yang sama atau berbeda dengan pembayaran gaji.

Keuntungan dari metode ini antara lain pengendalian pembayaran terutama penetapan besar pensiun ditangani pemerintah, penganggaran pemerintah, besaran perkiraan keadaan nyata (*cash basic*), adapun kerugiannya antara lain peningkatan pensiun dari tahun ke tahun, akibat penambahan penerimaan pensiun, sekalipun tidak dapat kenaikan gaji atau pensiun, peningkatan pembayaran akan terjadi karena lama kehidupan penerimaan pensiun mungkin panjang, sejalan dengan peningkatan kesehatan masyarakat terutama bila usia pensiun tidak berubah dan lama pembayaran akan lebih panjang karena adanya pembayaran

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pensiun bagi ter-tanggung (istri/suami dan anak). Merujuk pada sistem tersebut.

## 2. Sistem Pendanaan Penuh (Full Founded System)

Metode lainnya ialah metode pendanaan penuh (*Full Founded System*), dari metode ini iuran dapat bersumber dari pemerintah bersama PNS, iuran dijadwalkan mendahului pembayaran manfaat pensiun dan tabungan hari tua, iuran pemerintah terdiri dari iuran tetap (tahunan) penghasilan PNS dan atas Nama PNS, dan iuran tambahan apabila diperlukan untuk pendanaan, iuran PNS ada berdasarkan bagian tertentu dari penghasilan setiap bulannya, alokasi penganggaran iuran sebagian dari penghasilan PNS dan untuk memungkinkan pengembangan dana, pengelolaan program dipisahkan dari pengelolaan pemerintah.

Keuntungan metode ini antara lain bahwa beban pembayaran, pengelolaan pembayaran dan penerimaan pensiun dialokasikan terpisah dari beban anggaran pemerintah, beban pemerintah untuk pembayaran iuran dapat diperkirakan bersamaan dengan pembayaran penghasilan PNS pada saat jumlah PNS tidak bertambah, maka iuran pemerintah hanya akan meningkat karena adanya pengaruh penyesuaian inflasi atau tingkat kehidupan dan beban iuran tambahan dapat dialokasikan secara diperkirakan dan tetap dalam jangka waktu tertentu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.1.5 Pengertian Dana Pensiun Pemerintahan

Khtut Selvina Mangani.M.A. (2009). Dana Pensiun adalah instrumen keuangan yang mengakumulasikan kekayaan seorang selama berkerja dan membayarnya pada masa Pensiun. Akhir-akhir ini permintan terhadap instrument Dana Pensiun menunjukkan tren yang semangkin meningkat. Peningkatan permintaan dana pensiun terjadi karena kehidupann yang semangkin bersifat urban, sehingga orang tua semangkin sulit untuk menggantungkan masa tua nya pada anak-anaknya. Dalam kehidupan pedesaa, keluarga hidup berkelompok, alasan lain meningkatnya permintaan terhadap dana pensiun adalah harapan hidup yang semangkin meningkatnya dan umur pensiun yang semangkin muda. Semangkin senior seseorang dalam perusahaan, semangkin tinggi gaji yang diminta, sementara produktivitasnya semangkin menurun keadaan itu mendorong perusahaan untuk mem pensiunkan pekerjanya yang sudah tua dan memperkerjakan tenaga kerja yang lebih muda. Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang asuransi soeial pegawai Negri Sipil, maka dilakukan penggabungan program kesejataeraan pegawai negri yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang dikelola oleh perusaan Negara TASPEN (PN TASPEN). Saat ini, PN TASPEN telah diubah menjadi PT. TASPEN (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dr. Thambrin Abdullah. (2014). Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana Pensiun diatur dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992. Penyelenggaraan suatu program pensiun oleh pemberi kerja bersifat sukarela artinya didasarkan pada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk. Jenis dana pensiun terdiri atas dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan program pensiun yang diperkenankan dijalankan bagi setiap dana pensiun adalah program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Pembentukan dana pensiun harus memenuhi beberapa asas, yaitu :

1. Keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya
2. Penyelenggaraan dalam sistem pendanaan
3. Pembinaan dan pengawasan

Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun.

Menurut Totok Budisantoso (2014). Dana Pensiun adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi persertanya. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan pada suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan penyerahan kepada Lembaga-Lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun.

#### 3.1.6 Jenis-Jenis Kelembagaan Dana Pensiun

##### 1. Dana Pensiun pemberi Kerja ( DPPK )

Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja yaitu PP Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja.

##### 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan ( DPLK )

Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang diperkenankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja ( DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan ( DPLK ).

### 3.1.7 Jenis-Jenis Program Pensiun

#### 1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 (1)

“Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun”

Dalam PPIP, program pensiun iuran pasti mengacu pada kontribusi pekerja untuk program dana pensiun. Biasanya, perusahaan/ pemberi kerja memotong persentase tertentu dari gaji karyawan sebagai iuran pasti. Pemberi kerja akan membayar iuran pasti dalam jumlah yang pasti pada setiap periode kepada suatu badan yang terpisah dari perusahaan atau pihak ketiga .

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa PPIP merupakan suatu program dimana manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada masa pensiun adalah nilai mendatang dari kontribusi atau iuran berasal dari karyawan, dikelola oleh satu badan tersendiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti ( PPMP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 (1)

“Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Pasti.”

Dalam PPMP, pemberi kerja menjajikan pembayaran manfaat pensiun dalam jumlah yang pasti setelah karyawan tidak berkeraja berdasarkan pada beberapa tahun kryawan tidak berkerja dan berdasarkan berapa tahun berkerja dan rata-rata gaji karyawan selama dia berkerja pada suatu perusahaan tertentu, tetapi tidak ada spesifikasi jumlah peemberi kerja membayar iuran dana pensiun. Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa PPMP adalah suatu program pensiun yang menjajikan manfaat pensiun pasti.

**3.1.8 Azas dan Peraturan Dana Pensiun**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan Dana Pensiun di negara kita. Dalam kedudukan penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki (lima) 5 asas yang berpungsi sebagi pengarah untuk mencapai maksud dan tujuan utama dan pensiun di Indonesia ini. Asas-asas pokok yang dimaksud:

1. Asas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Serta diurus dan dikelola oleh satu badan pengurus yang terdapat didalam nya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.

#### 2. Asas Penyelenggaraan dana sistem pendanaan.

adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pribadi. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta diwaktu peserta itu pensiun. Sebab itulah Undang-Undang tidak memperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat past.

#### 3. Asas Pembinaan dan Pengawasan Oleh Pemerintah.

Asas ketiga dana pensiun ini dalah dimaksudkan untuk mengawas dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.

#### 4. Asas Penghasilan yang Ditunda

Dana yang dikumpulkan dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika perserata memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

#### 5. Asas Kebebasan Pembentukan Dana Pensiun

Asas yang dimaksud disini adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjajikan manfaat pensiun bagi karyawan. Ini mengingat pembentukan dana pensiun memberikan konsuensinya pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untuk penyelenggaraan dana pensiun tidak lepas dari kosenkuensi pembiayaan bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

Azas-Azas diatas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas adalah untuk menyediakan suatu tata kelambagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

### 3.1.9 Laporan Keuangan Dana Pensiun

#### 1. Laporan Aktiva Bersih

Laporan Aktiva Bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi tentang jumlah kekayaan (aktiva) bersih dana pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun kepada peserta. Anggaran Laporan Aktiva dapat menggambarkan keadaan yang lebih jelas, maka dalam penyusunan laporan aktiva bersih harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dalam bidang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pensiun. Hal ini berarti dalam Laporan Aktiva Bersih harus dibuat dengan sedemikian rupa sehingga dengan mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan untuk perhitungan, pendanaan dan kekayaan dana pensiun. Demikian juga terhadap investasi dana pensiun harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Besarnya Aktiva Bersih ditentukan dengan selisih antara jumlah aktiva dan dana pensiun dengan kewajiban selain kewajiban manfaat pasti yang belum jatuh tempo.

## 2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat tertentu dan terdiri dari kekayaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengertian tersebut. Neraca Dana Pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas kekayaan dan kewajiban dana pensiun. Baik kewajiban dana manfaat pensiun maupun kewajiban yang lain. Komponen Neraca Pensiun terdiri dari :

- a. Posisi keuangan dana pensiun
- b. Nilai historis khusus untuk investasi, ditentukan juga nilai wajar nya

## 3. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitngan hasil usah adalah laporan yang dapat menggambarkan hasil usaha dana pensiun selama priode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus dan pensiun pada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode yang bersangkutan agar hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas maka :

- a. Harus diungkapkan secara terinci unsur pendanaan dan beban
  - b. Harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan diluar investasi
  - c. Beban administrasi
  - d. Pendapatan alain-lain
4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang dapat memberikan kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas.

Agar Laporan Arus Kas dapat menggambarkan alokasi kondisi kas yang sejelas-jelasnya, maka dalam penyusunan laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan selama periode Akuntansi.

#### 2. Tinjauan Praktek

Dalam pelaksanaan praktek lapangan atas penulisan karya tulis ini, penulis berkesimpulan bahwa akan menguraikan cara perhitungan dana pensiun pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **3.2.1. Pengelolaan Dana Pensiun Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. UU No. 11 Tahun 1996 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda PNS.
- b. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999, Tentang pokok-pokok Pegawaian.
- c. PP No. 7 Tahun 1977, PP No. 15 Tahun 1985, PP No. 15 Tahun 1992, PP No, 15 Tahun 1993, PP No. 6 Tahun 1997 dan PP No 10 Tahun 2008.
- d. PP No. 32 Tahun 1974, Tentang Pemberhentian Pegawai Negri Sipil.
- e. PP No. 12 Tahun 1981, Tentang Perwatan Tunjangan Cacat Dan Uang Duka.\
- f. PP No. 1 Tahun 1983, Tentang perlakuan terhadap calon PNS yang tewas atau cacat akibat kecelakaan Dinas.
- g. PP No. 49 Tahun 1980, Tentang pemberhentian tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS, janda/duda PNS.
- h. PP No. 5 Tahun 1987, Tahun pemberlakuan terhadap penerimaan pensiun.
- i. PP No. 8 Tahun 1989, Tentang pemberhetian dan pemberian dana Pensiun.
- j. SE Ka. BAKN, No. 16/SE/1982, Tentang pemberhentian PNS daerah yang berpangkat Pembina Tk I Golongan ruang IV/b keatas.

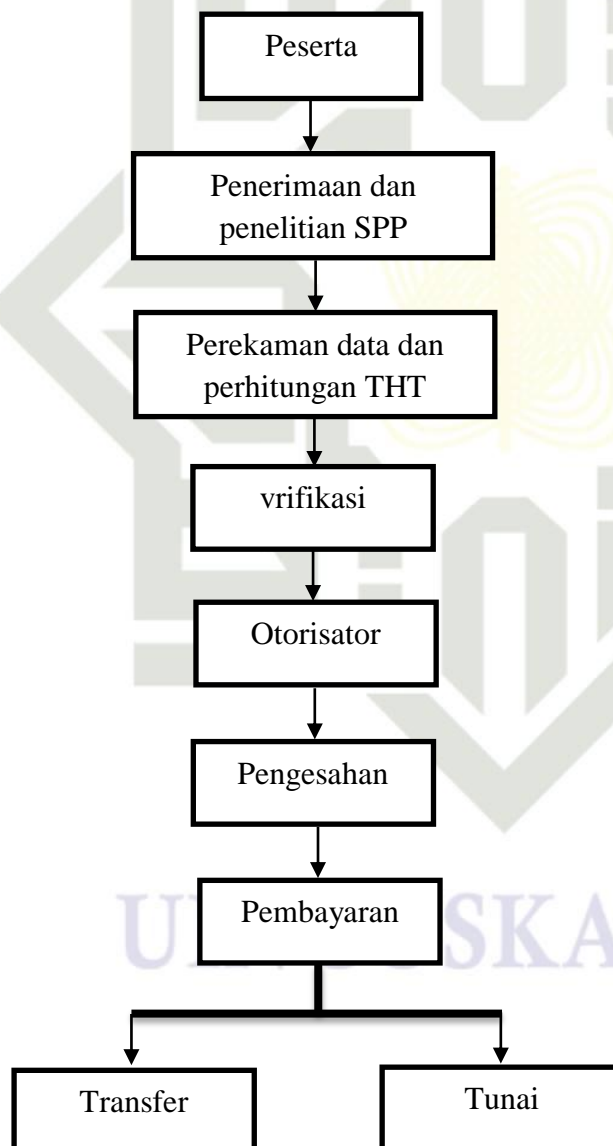
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Keputusan Ka. BAKN No. 74/Kep/1989 Tentang pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS Daerah serta pemberian pensiun janda/duda.
- l. PP No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, dan pemindahan dan penmberhentikan Pegawai Negri Sipil.

#### 3.2.2. Flowchart Sistem Pengajuan SPP Langsung

Gambar 3.2



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Penjelasan Sistem Pengajuan SPP langsung:

1. Peserta datang ke kantor cabang PT Taspen (Persero) pekanbaru dengan membawa Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kemudian menyerahkan kebagian Customer service.
2. Setelah petugas Customer Service menerima SPP tersebut kemudian petugas customer service melakukan penelitian, yaitu mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen beserta persyaratannya. Apabila terdapat kekurangan dari persyaratan dokumen, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada peserta untuk segera melengkapi kekurangan yang ada. Tetapi jika persyaratan sudah sesuai, maka proses akan dilanjutkan ke bagian berikutnya.
3. Proses selanjutnya adalah diproses oleh bagian updating data dan bagian perhitungan hak pensiun, yaitu memasukan data diri dari peserta serta perhitungan hak pensiun yang akan diterima oleh peserta setelah mencetak Lembar Perhitungan Hak (LPH).
4. Setelah dihitung hak pensiunnya, langkah selanjutnya adalah SPP diserahkan ke bagian verifikasi untuk kemudian diperiksa hasil perhitungannya serta melakukan pemeriksaan dari awal proses SPP tersebut.
5. Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian verifikasi selesai dan sudah sesuai, selanjutnya dilakukan pengesahan berdasarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen – dokumen yang ada (SPP dan LPH) yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan (otorisator).

6. Setelah proses otorisator dilakukan, selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Kepala Bidang Keuangan.
7. Langkah selanjutnya setelah disahkan, maka dibuatkan voucher untuk kemudian dilakukan proses pembayaran oleh kasir. Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara tunai, ataupun secara transfer.

#### 3.2.3. Prosedur Tunjangan Hari Tua (THT)

Tunjangan Hari Tua (THT) karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari perusahaan dan berhak atas pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun cacat, atau meninggal dunia dengan masa kerja minimal 10 tahun serta belum pernah mendapat fasilitas membeli rumah dinas dari perusahaan/negara memperoleh santunan hari tua dalam bentuk uang tunai yang besarnya didasarkan atas lamanya masa kerja efektif pada perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

##### 1. Karyawan PNS

Setiap PNS dikenakan potongan setiap bulannya dari gaji yang diterima,

2. Ketentuan memberikan THT tersebut akan dikompensasikan dengan penerimaan yang diterima karyawan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 167 undang-undang no 13 tahun 2003

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masa kerja untuk perhitungan santunan hari tua dihitung mulai tanggal penerimaan bekerja sebagai karyawan.
4. Adapun yang berhak menerima THT adalah karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari perusahaan yang telah memiliki masa kerja efektif minimal 10 (sepuluh) tahun dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Pensiun normal
  - b. Pensiun dipercepat
  - c. Pensiun cacat
  - d. Meninggal dunia

Untuk karyawan yang meninggal dunia telah mencapai dunia pensiun, kepada ahli warisnya diberikan santunan yang paling menguntungkan, apakah memperoleh THT atau memperoleh hak sesuai pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003.

5. Yang tidak berhak menerima THT
  - a. Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat dari perusahaan.
  - b. Berhenti atas kemauan sendiri (bukan kehendak perusahaan) kepadanya diberikan uang pisah.

Bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun maka akan mendapatkan THT dan Pensiun. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah :

THT

1. Formulir Permintaan Pembayaran
2. FC SK Pensiun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. KPPG atau asli SKPP
4. FC Identitas / KTP Pemohon
5. FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank)

#### 3.2.4. Dasar Perhitungan Dana Pensiun

Dasar Perhitungan Dana Pensiun:

1. Masa kerja diatas 20 tahun : jumlah tahun x 2,5 x gaji pokok

Mencari Gaji Pokok Pensiun:

- 1) Masa Kerja x 2,5% x Gaji Pokok Terakhir

Mencari Pokok Iuran:

- a) Gaji Pokok Terakhir x 10%

#### 3.2.5. Jurnal Dana Pensiun

Jurnal biasa untuk mencatat gaji yang sebenarnya,  
jika tidak ada potongan:

Beban Gaji	xx	
		Kas xx

Jika ada Potongan:

Beban Gaji	xx	
		Iuran Peserta xx
		Kas xx

#### 3.2.6. Data Pensiunan PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Nama              | : Drs. Syahrizal |
| 2. Masa Kerja        | : 30 Tahun       |
| 3. Gaji Terakhir     | : 3.204.700      |
| 4. Golongan Terakhir | : IIIA           |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nama	: H. Yudasman, SE.AK.MM
2. Masa Kerja	: 32 Tahun
3. Gaji Terakhir	: 4.121.800
4. Golongan Terakhir	: IVD

### 3.2.7. Perhitungan Dana Pensiun Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mencoba membuat perhitungan dana pensiun pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau. Berikut ini adalah perhitungan dana pensiun tersebut:

#### Resume Dana Pensiun

1. Nama	: Drs.Syahrizal
2. Golongan Terakhir	: IIIA
3. Gaji Terakhir	: 3.204.700
4. Iuran Perbulan	: 320.470
5. Pensiun Yang di Terima	: 2.403.525

Rumus untuk mencari max pensiun yang di terima = masa kerja x 2,5% x gaji terakhir

Rumus mencari iuran bulanan = gaji terakhir x 10%

Cara perhitungan pensiun atas Nama Drs.Syahrizal

$$30 \times 2,5\% \times 3.204.700 = 2.403.525$$

Cara mencari perhitungan iuran perbulan :

$$3.204.700 \times 10\% = 320.470$$

#### Resume Dana Pensiun

1. Nama	: H. Yudasman, SE. AK.MM
2. Golongan Terakhir	: IVD
3. Gaji Terakhir	: 4.121.800
4. Iuran Perbulan	: 421.180
5. Pensiun Yang di Terima	: 3.294.440

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumus untuk mencari max pensiun yang di terima = masa kerja x 2,5% x gaji terakhir

Rumus mencari iuran bulanan = gaji terakhir x 10%

Cara perhitungan pensiun atas Nama H. Yudasman, SE. AK.MM

$$33 \times 2,5\% \times 4.121.800 = 3.294.440$$

Cara mencari perhitungan iuran perbulan :

$$4.121.800 \times 10\% = 421.180$$

**3.2.8. Jurnal Dana Pensiun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau**

**1. Jurnal Dana Pensiun Atas Nama: Drs. Syahrizal**

Beban Gaji	Rp. 3.204.700
Iuran Peserta	Rp. 320.470
Kas	Rp. 2.884.230

**2. Jurnal Dana Pensiun Atas Nama: H. Yudasman, SE. AK.MM**

Beban Gaji	Rp. 4.121.800
Iuran Peserta	Rp. 421.180
Kas	Rp. 3.700.620

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan maka bisa dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Pengelolaan dana pensiun pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersifat khusus, mengikuti aturan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1969.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode sekarang yang digunakan dalam sistem pendanaan dana pensiun PNS adalah metode pendanaan penuh (*Full Founded system*), dalam metode ini iuran dapat bersumber dari Pemerintah bersama PNS, iuran dijadwalkan mendahului pembayaran manfaat pensiun dan tabungan hari tua, iuran pemerintah terdiri dari iuran tetap (Tahunan) berdasarkan pada penghasilan PNS dan atas nama PNS, dan iuran tambahan bila diperlukan untuk pendanaan, iuran PNS ada berdasar bagian tertentu dari penghasilan setiap bulannya, alokasi penganggaran iuran sebagai bagian dari penghasilan PNS dan untuk memungkinkan pengembangan dana, pengelolaan program dipisahkan dari pengelolaan pemerintah.

Pencatatan akuntansi dana pensiun pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau tidak dilampirkan di dalam laporan keuangan dinas tersebut, melainkan pada laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Riau tercatat pada laporan keuangan PT.TASPEN.

Mekanisme pemotongan dana pensiun di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melalui pemotongan gaji PNS sehingga gaji yang diterima adalah gaji yang sudah dipotong iuran dana pensiun.

Karena sudah diatur semedikian rupa oleh peraturan dan perundangan, maka tata kelola pensiun PNS, termasuk didalamnya perlakuan Akuntansi dana pensiun, mengacu pada Undang-Undang. Jadi pencatatan akuntansi dana pensiun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)